Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Adanya prioritas untuk perbaikan atau peningkatan drainase dengan mempertimbangkan status kondisi yang ada, diprioritaskan pada drainase yang dalam kondisi kritis		Drainase • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran air/drainase • Seringkali terjadi pengalihan saluran drainase tanpa seizin pihak terkait di DPUPR oleh masyarakat sehingga menimbulkan banjir dan genangan baru	sungai/ saluran drainase untuk meminimalisir adanya sampah yang dibuang ke saluran/badan sungai. • Melakukan koordinasi dan teguran kepada pihak yang melanggar, membongkar atau menutup adanya saluran drainase.

Sasaran 3.1.3: Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat

Tabel 3.68
Capaian Sasaran 3.1.3 "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
2.1.10	Meningkatnya layanan sarana angkutan	Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk		n/a	0,07	0,07	40,00	80%	Penghitungan indikator ini dilakukan dengan indikator proksi (pengganti) karena tidak relevan
		Indikator proksi :Tingkat Penggunaan Angkutan Umum	Persen	n/a	8%	9%	9%	12%	100%

Sasaran "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat" berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap sasaran di RPJMD oleh Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah memiliki indikator yang kurang relevan untuk menggambarkan pencapaian terhadap sasaran. Sebagai upaya memberikan gambaran kondisi pencapaian sasaran yang lebih akurat, kami menggunakan indikator proksi, dalam bidang statistik proksi merupakan variable yang berfungsi pada variable (indikator) yang tidak dapat diukur, agar menjadi proksi yang baik harus memiliki korelasi yang erat. Indikator proksi yang

digunakan dalam hal ini adalah Tingkat Penggunaan Angkutan Umum. perubahan ini dilakukan karena dua hal mendasar :

1. Target yang ditetapkan pada indikator semula yaitu rasio jumlah angkutan umum dan jumlah masyarakat dengan jumlah 40% dan target akhir 80% tidak relevan, sebagai perbandingan studi internasional yang pernah di rilis The World Bank pada ppif.org suatu standar sebuah kota yang memilki jaringan transportasi umum baik berada pada rasio 1 : 1000 jika kendaraan tersebut adalah Bus, sementara Kota Cirebon dengan moda transportasi angkutan umum tipe mobil dengan kapasitas ¼ Bus saat ini memiliki rasio sekitar 7 : 1000 sehingga dapat dikatakan jumlah ini cukup ideal bagi sebuah kota. Dan seyogyanya saat ini Kota Cirebon telah memiliki rasio ideal tersebut.
2. Jumlah Rasio Kendaraan Umum dan Jumlah Penduduk bukanlah suatu indikator yang menunjukan outcome, karena belum merujuk pada manfaat jangka panjang, jumlah rasio yang ideal tidak menunjukan gambaran apakah angkutan yang tersedia termanfaatkan. Hal ini dapat ditunjukan dengan menjadikan tingkat penggunaan angkutan umum.

Melalui indikator "Tingkat Penggunaan Angkutan Umum" dapat ikut serta mendorong pencapaian tujuan dan misi ke-3 **"**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan**"** sebagai upaya nyata khususnya di bidang transportasi dimana fokus penggunaan transportasi umum akan berdampak pada pengurangan emisi sekaligus mengurangi potensi kemacetan.

Pencapaian Indikator "Tingkat Penggunaan Angkutan Umum"

Tingkat Penggunaaan angkutan umum menjadi indikator yang lazim digunakan untuk mengukur seberapa efektif tingkat manfaat dari ketersediaan sarana pelayanan umum, pressure pada peningkatan penggunaan angkutan umum juga merupakan upaya yang berdampak multiply effect, diantaranya menjadi faktor dalam mengurai kemacetan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan kendaraan. Kota Cirebon pada tahun 2020 menargetkan tingkat Penggunaan Angkutan Umum sebesar

9% dari jumlah penduduk dengan target akhir meningkat menjadi 12%. Adapun pencapaian pada tahun 2020 ditunjukan melalui survey dan Analisis Tim PKL Kota Cirebon Tentang Proporsi Pemilihan Moda Transportasi sebagai berikut :

Tabel 3.69
Analisis Tim PKL Kota Cirebon Tentang Proporsi Pemilihan Moda Transportasi

Zona	SepedaMotor		Mobil		Angkutan Umum		Becak		Sepeda		Jalan Kaki	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1	532	2,48%	157	6,22%	14	0,80%	32	10,32%	24	5,17%	16	1,61%
2	253	1,18%	46	1,82%	11	0,63%	3	0,97%	4	0,86%	3	0,30%
3	292	1,36%	85	3,37%	70	3,98%	18	5,81%	12	2,59%	6	0,60%
4	383	1,78%	82	3,25%	42	2,39%	18	5,81%	15	3,23%	34	3,42%
5	578	2,69%	74	2,93%	51	2,90%	12	3,87%	8	1,72%	35	3,52%
6	553	2,57%	131	5,19%	75	4,27%	18	5,81%	21	4,53%	18	1,81%
7	581	2,70%	83	3,29%	27	1,54%	4	1,29%	20	4,31%	6	0,60%
8	438	2,04%	61	2,42%	33	1,88%	19	6,13%	10	2,16%	66	6,63%
9	446	2,08%	53	2,10%	42	2,39%	10	3,23%	8	1,72%	53	5,33%
10	858	3,99%	142	5,63%	96	5,46%	20	6,45%	16	3,45%	31	3,12%
11	554	2,58%	93	3,69%	56	3,19%	14	4,52%	19	4,09%	24	2,41%
12	934	4,35%	101	4,00%	71	4,04%	7	2,26%	4	0,86%	7	0,70%
13	773	3,60%	98	3,88%	82	4,67%	9	2,90%	12	2,59%	83	8,34%
14	751	3,50%	87	3,45%	70	3,98%	18	5,81%	19	4,09%	24	2,41%
15	505	2,35%	91	3,61%	69	3,93%	15	4,84%	25	5,39%	22	2,21%
16	893	4,16%	173	6,86%	152	8,65%	27	8,71%	75	16,16%	220	22,11%
17	480	2,23%	105	4,16%	86	4,89%	12	3,87%	16	3,45%	33	3,32%
18	995	4,63%	156	6,18%	93	5,29%	11	3,55%	24	5,17%	90	9,05%
19	1156	5,38%	227	9,00%	185	10,53%	17	5,48%	48	10,34%	138	13,87%
20	1141	5,31%	93	3,69%	70	3,98%	12	3,87%	40	8,62%	26	2,61%
21	1372	6,39%	168	6,66%	167	9,50%	9	2,90%	10	2,16%	34	3,42%
22	1277	5,94%	217	8,60%	195	11,10%	5	1,61%	34	7,33%	26	2,61%

Sumber : Dinas PerhubunganKota Cirebon, di olah

Berdasarkan tabel diatas berikut merupakan grafik proporsi pemilihan moda penduduk Kota Cirebon, dimana prosentase pengguna angkutan umum adalah 8%.

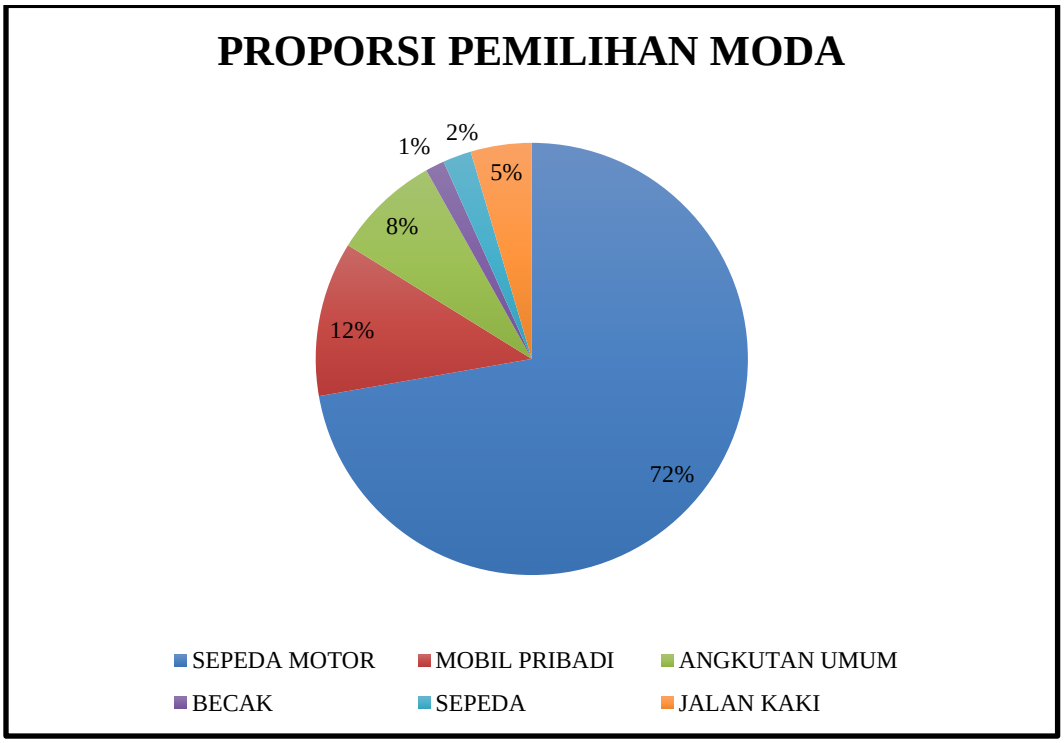

Kondisi 9% penggunaan jumlah angkutan umum memenuhi target pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk dibawah 500 ribu penduduk, 9% penggunanaan angkutan umum sudah cukup baik jika ditinjau pengaruh pada faktor kemacetan namun perlu terus ditingkatkan, sebagai pembanding Kota Bandung dengan penduduk 2,5 Juta tercatat pengguna transportasi umum berada pada kisaran 17%.

Evaluasi Sasaran "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat"

Sasaran "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat" dengan satu indikator menunjukan pencapaian yang sangat baik yaitu 100%. Pencapaian ini merupakan upaya yang dilakukan berbagai stakeholder khususnya Dinas Perhubungan yang secara berkala mengedukasi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. di sisi lain hal ini merupakan tantangan untuk meningkatkan pencapaian di tahun berikutnya dengan target yang lebih tinggi. Pada tahun 2020 juga belum tercatat inovasi

yang telah diimplementasikan pada layanan sarana angkutan umum di Kota Cirebon ini. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya diharapkan ada inovasi yang dapat meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum. Program-program yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.338.820.736,00	6.336.397.400,00	99,96%
Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman	9.078.421.000,00	9.076.448.000,00	99,98%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			99,97%

Sebagai upaya perbaikanpada taun yang akan datang, kami melakukan analisa terhadap faktor pendukung, permasalahan, serta solusi terkait sasaran 3.1.3, berikut ini:

Tabel 3.70

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.1.3 “Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat”
Tahun 2020

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Adanya kepedulian pemerintah dalam mengembangkan transportasi massal • Trayek angkutan umum telah mencacah seluruh wilayah Kota Cirebon		• Inovasi Transportasi Massal di Kota Cirebon belum terimplementasi • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi public Belum Prima nya layanan angkutan umum di Kota Cirebon khususnya angkot.	• Dilaksanakannya kajian dengan inovasi terbarukan berkaitan dengan Transportasi Massal • Dilaksanakannya peningkatan daya tarik penggunaan angkutan umum • Peningkatan pelayanan angkutan umum lewat implementasi SPM Angkuta Kota (angkot)

Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Tabel 3.71
Capaian Sasaran 3.1.4 "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	44,05	51,96	56,25	45,50	47,00	123,64%

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" dengan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja "Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan" . Indeks KUlaitas Lingkungan Hidup penting menjadi tolak kukur mengingat Misi ke-3 melakukan upaya manjamin kualitas lingkungan hidup terjaga seiring dengan pembangunan di Kota Cirebon.

Pencapaian Indikator "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan HIdup (IKLH) pada poin 45,50 Berdasarkan perhitungan IKLH Tahun 2020 bahwa Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan pada periode tahun sebelumnya yaitu dari 51,96 pada tahun 2019 menjadi 56,25 pada tahun ini (2020). Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan masing-masing indeks serta parameter yang masuk dalam perhitungan, sehingga bobot dari perhitungan pun berbeda. Perubahan bobot dari masing-masing indeks dimaksud yaitu :

- Nilai IKA (Indeks Kualits Air) sebesar 50,00 dari yang tahun sebelumnya 56,92. Atau terjadi penurunan nilai sebesar 6,92
- Nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) sebesar 73,13 yang tahun sebelumnya sebesar 68,58. Atau terjadi peningkatan nilai sebesar 4,55
- Nilai IKL (Indeks Kualitas Lahan), walau terjadi perubahan luasan, dari yang sebelumnya 5,16 Km^2 menjadi 6,2749 Km^2 tidak berdampak signifikan terhadap IKL hanya terdapat peningkatan sebesar 0,0113.

Berikut adalah Trend Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sesuai tabel 3.63 yang telah disebutkan diatas :

NO	TAHUN	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS TUTUTPAN LAHAN	IKLH
1	2014	50,00	90,03	30,62	54,26
2	2015	50,00	78,95	30,62	50,93
3	2016	50,00	72,40	32,50	49,72
4	2017	61,43	53,04	32,63	47,39
5	2018	25,38	78,03	32,63	44,07
6	2019	56,92	68,58	35,77	51,96
7	2020	50,00	73,13	35,78	56,25

Sumber : DLH Kota Cirebon 2020

Meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan ini terdorong oleh adanya peningkatan indeks kualitas Udara yang cukup signifikan, dari yang sebelumnya 68,58 tahun 2019 menjadi 73,13 pada tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 4,55 Poin Poin IKLH Kota Cirebon tahun 2020 sebesar 56,25 telah melebihi target pencapaian pada tahun 2020 yaitu 45,5 sehingga pencapaian kinerja Indikator ini adalah 124,72%.

Evaluasi Sasaran 3.1.4 "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim"

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" dengan sebuah indikator yang capaianya hingga 124,72% memiliki predikat pencapaian **Sangat Baik.** Program yang mendukung sasaran 3.1.4 ini adalah sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Penyelenggaraan Jalan	14.893.517.100,00	14.567.994.600,00	97,81%
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	75.120.000,00	66.520.000,00	88,55%
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.904.920.597,00	1.903.250.000,00	99,91%
Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	23.565.489.230,00	19.087.086.670,00	81,00%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	11.399.198.000,00	12.188.415.761,00	106,92%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1.288.705.000,00	1.190.953.848,00	92,41%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	85.395.000,00	82.395.000,00	96,49%
Program Pengelolaan Pertanahan	497.655.000,00	318.651.500,00	64,03%
Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	1.293.019.000,00	1.207.841.250,00	93,41%
Program Penyediaan Perumahan	325.855.000,00	292.151.500,00	89,66%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	494.810.000,00	491.563.800,00	99,34%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	430.000.000,00	418.542.750,00	97,34%
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	472.254.000,00	453.900.000,00	96,11%
Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.4			97,60%

Kendati telah memiliki pencapaian yang Sangat Tinggi terhadap target yang telah ditetapkan, kritik dan evaluasi untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup sangat penting, salah satu faktor yang harus menjadi prioritas perhatian pada tahun –tahun berikutnya adalah pada faktor indeks kualitas air.

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.72
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.1.4. **"**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" Tahun 2020

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Dilaksanakanya kegiatan monitoring terhadap Indeks Lingkungan Hidup secara berkala • Terlaksananya program pendukung yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran • Isu lingkungan menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan • Mulai terlibatnya	• Penurunan kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya , kulitas air sebagai komponen dalam Indeks Lingkungan HIdup, dikarenakan pencemaran yang belum terkendali khususnya limbah rumah tangga • Belum adanya transportasi massal sebagai bentuk upaya pengurangan emisi dari kendaraan pribadi • Rendahnya kesadaran	• Penguatan dan penerapan kebijakan pada baku mutu air (badan air), baku mutu limbah cair terolah *(effluent standar)* karena pada tahun 2020 Indeks kualitas Air mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya • Sinergitas antara Perangkat Daerah yang pelaksanaan program/kegiatanya mempengaruhi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diantaranya DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Perhubungan. • Meningkatkan kerjasama

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
beberapa komunitas untuk beraktivitas lingkup kepedulian pada lingkungan		masyarakat terhadap lingkungan, masih banyak ditemukanya aktivitas membuang sampah sembarangan serta pencemaran terhadap sungai atau saluran air	dengan komunitas khususnya penggiat lingkungan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam masalah lingkungan.

Misi ke 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif

Misi 4, yaitu : **"Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif**", selaras dengan Misi 4 RPJPD, yaitu : **"Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan",** yang ditandai dengan :

a. Menciptakan situasi politik yang kondusif melalui terselenggaranya iklim politik yang sehat.
b. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
c. Terswujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Cirebon yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
d. Meningkatnya investasi untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka mendorong pencapaian atau mewujudkan Misi 4 ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan 1 tujuan dan 3 sasaran, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan "Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan"

Tabel 3.73
Tujuan 4.1 "Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan Kota Cirebon"

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
3.1.4	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Poin	n/a	76,70	76,61	70,00	83,00	109%

Tujuan "Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan" dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan ketertiban Umum menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Pengukuran dengan indikator tersebut relevan karena menjadikan penerima layanan sebagai salah satu *tools* dalampengukuran kinerja.

Pencapaian Indikator "Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan ketertiban Umum"

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum hampir serupa dengan indeks rasa aman, dimana indeks ini belum lazim di gunakan khususnya di Negara kita, pembahasan indeks rasa aman pernah muncul pada diskusi yang dilakukan oleh Bappenas, diskusi tersebut merupakan usulan pengembangan metode pengukuran indeks keamanan Indonesia, dalam konteks internasional lazim dikenal human security. Pada umumnya teori yang dibangun pada isitilah rasa aman / *human security* adalah keamanan terhadap gangguan dari kekerasan dan kejahatan, gangguan dari bencana serta aman dalam aspek social ekonomi. Jika disandingkan dengan amanah urusan pemerintahan pada undang-undang 23 bidang ketentraman dan ketertiban umum maka memiliki korelasi yang jelas khususnya dalam lingkup keamanan dari gangguan ketertiban umum serta gangguan dari bencana.Serta menjadikan factor di luar urusan ketentraman dan ketertiban umum (yang digariskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014) yaitu sosial ekonomi sebagai penentu dalam merumuskan nilai indeks kemanan tersebut. Dilator belakangi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Perangkat daerah yang mengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan survey dengan metode skala likert yangftg diadopsi dari pada Permenpan 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat. Namun dalam implementasinya kami lakukan pengembangan dengan memodifikasi butir-butir pertanyaan agar dapat menggali lebih jauh informasi dari objek terkait gangguan

ketentraman dan ketertiban umum, hal ini guna menjamin gambaran tingkat kepuasan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

Hasil survei terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2019 mencapai angka 76,70 dari target 62,00 yang berarti telah mencapai presentase 123,70% sehingga dapat mencapai predikat sangat baik, berikut adalah rekapitulasi hasil survei tersebut

Tabel 3.74

Rekapitulasi Hasil Survey Tingkat Kepuasan terhadap Trantibum Tahun 2020

No	**Unsur Pelayanan**	**Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan**	**Bobot Rata-Rata Tertimbang**	**Nilai Indeks**
1	Dampak Gangguan	3,220	0.11	0,35420
2	Penanganan Gangguan	3,293	0.11	0,36227
3	Waktu Pelayanan	2,980	0.11	0,32780
4	Efek jera Sanksi/denda	2,813	0.11	0,30947
5	Produk Layanan	2,973	0.11	0,32707
6	Kompetensi Petugas	3,140	0.11	0,34540
7	Perilaku Pelaksana	3,287	0.11	0,36153
8	Sarana dan Prasarana	2,927	0.11	0,32193
9	Penanganan Pengaduan	3,260	0.11	0,35860
			Nilai Indeks Unit Pelayanan	3,06827
			Nilai IKM setelah dikonversi (Total Nilai Indeks x 25)	**76,7067**
			Mutu Pelayanan	**B**
			Kinerja Unit Pelayanan	**Baik**

Dalam Mendukung tujuan sebagai bagian dari gambaran kondisi pada pencapaian Misi Ke-1, ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat
2. Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional
3. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Masing-masing sasaran akan diuraikan secara komprehensif sebagai berikut :

Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Tabel 3.75
Capaian Sasaran 4.1.1 "Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	Realisasi 2020	Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
4.1.1	Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Lokasi/titik)	Titik	60	55	43	45	15	109%
		Indeks Trantibum masyarakat kecamatan (Nilai indeks rata-rata keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan) :							
		Kecamatan Kejaksa	Poin	n/a	n/a	85,67	75	85,00	114%
		Kecamatan Lemahwungkuk	Poin	n/a	n/a	69,83	77	90,00	91%
		Kecamatan Harjamukti	Poin	n/a	n/a	83,83	75	90,00	112%
		Kecamatan Pekalipan	Poin	n/a	n/a	81,50	82.50	90,00	99%
		Kecamatan Kesambi	Poin	n/a	n/a	84,17	60	80,00	140%

Sasaran "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan" dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Umum (Lokasi/Titik) menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Ketentraman dan ketertiban serta kondisi yang kondusif ditandai salah satunya adalah dengan berkurangnya Lokasi daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta indeks kemanan dan ketertiban umum pada tingkat kecamatan, pada tahun 2019 indikator indeks kemanan dan ketertiban umum tidak diukur karena indikator tersebut terfokus pada lokus di kecamatan. Namun pada tahun 2020 sebagai upaya peningkatan kinerja khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, indikator yang berada di wilayah kecamatan tersebut diukur dan disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon ini.

Pencapaian Indikator ke-1 "Jumlah Daerah rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan berkurangnya jumlah daerah rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum dimana pada kondisi awal yaitu 45 titik. Atas upaya penertiban di berbagai lokasi, pada tahun 2020 target tersebut tercapai menjadi 43 titik. Pengukuran rawan gangguan kemanan dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan meneliti kawasan yang memiliki frekuensi gangguan kemanan tinggi dan menyandingkan perkembangan kondisi kemanan tersebut melalui survey dan catatan gangguan kemananpada titik tersebut.

Dengan jumlah titik rawan 43 titik pada tahun 2020, hal ini menunjukan adanya pengurangan sekitar 12 titik rawan gangguan kemanan dan ketertiban umum jika disandingkan dengan target pada tahun 2020 45 titik maka Pengukuran pada indikator ini adalah jenis pengukuran pencapaian dimana semakin rendah realisasi maka tingkat pencapaian semakin baik, digunakan rumus : $\frac{Target+(Target-Realisasi}{Target} X\ 100\%$ = $\frac{45+(45-43)}{43} X\ 100\%$ yaitu 109% atau dengan predikat **Sangat Tinggi.**

Pencapaian Indikator ke-2 "Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat dalam 5 wilayah kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kejaksan (75)
2. Kecamatan Lemahwungkuk (77)
3. Kecamatan Harjamukti (75)
4. Kecamatan Pekalipan (82,50)
5. Kecamatan Kesambi (60)

Melalui metode survey dalam rangka merumuskan indeks kem ananan dan ketertiban umum masyakat di wilayah kecamatan terdapat data sebagai berikut :

Tabel 3.76

Nilai Indeks Trantibum di Wilayah Kecamatan Kota Cirebon Tahun 2020

NO	Kecamatan	Nilai Indeks Keamanan dan Trantibum	Keterangan
1	Kecamatan Kejaksan	85,67	
2	Kecamatan Lemahwungkuk	69,83	
3	Kecamatan Harjamukti	83,83	
4	Kecamatan Pekalipan	81,5	
5	Kecamatan Kesamibi	84,17	

Sementara itu rata-rata faktor pembentuk keamanan dan Trantibum di wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.77

Nilai Survey Indeks Trantibum di Wilayah Kecamatan Kota Cirebon

Per-Faktor Kemanan dan Trantibum Tahun 2020

NO	Faktor Kemanan dan Trantibum	Kejaksan	Lemah Wungkuk	Pekalipan	Kesambi	Harjamukti	
1	Rasa aman dari Bencana	4,77	4,63	4,30	4,50	4,17	

NO	Faktor Kemanan dan Trantibum	Kejaksan	Lemah Wungkuk	Pekalipan	Kesambi	Harjamukti	
	Alam						
2	Kepuasan Terhadap Penangan Bencana Alam	4,63	3,73	4,67	4,03	4,30	
3	Rasa aman dari Bencana non Alam (kebakaran)	4,73	3,57	4,40	4,23	4,57	
4	Kepuasan Terhadap Penangan Bencana non Alam (Kebakaran)	4,63	4,27	4,10	4,33	4,03	
5	Kondusifitas Kemanan Lingkungan	3,90	1,53	4,07	4,07	4,03	
6	Kepuasan Terhadap Penangan Kondusifitas Kemanan Lingkungan	3,87	3,73	3,90	4,07	4,17	
7	Kondisi Ketertiban Umum	3,80	2,70	3,47	4,10	3,87	
8	Penanganan terhadap gangguan ketertiban Umum yangterjadi	3,93	3,77	3,70	4,33	4,13	

Sumber : Kecamatan, diolah

Dari 8 faktor Keamanan dan Trantibum yang disurvey ditemukan bahwa faktor terendah ada pada faktor kondusifitas keamanan, dan kecamatan dengan nilai rendah tersebut ada pada kecamatan Lemah Wungkuk. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Tim Kecamatan Lemah Wungkuk, kondusifitas keamanan di wilayah tersebut memang kurang baik dengan beberapa titik daerah rawan kriminalitas, namun berbagai upaya perbaikan melalui lintas sektor terus dilakukan sehingga kondisi semakin baik

dari tahun ketahun, serta kendati masih ditemukanya tindakan kriminalitas atau gangguan kemanan diwilayah tersebut tapi Warga memiliki kepuasan yang cukup tinggi terhadap penanganan gangguan kemanan, berdasarkan hasil survey pada faktor Kepuasan Terhadap Penanganan Kondusifitas keamanan Lingkungan (terhadap gangguan keamanan) memiliki poin rata-rata 3,73 atau Baik.

Evaluasi Sasaran 1.1.12 "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan"

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan" ditunjukan dengan rata-rata pencapaian indikator tersebut diatas, yaitu 110%. berada dalam kategori atau predikat sangat tinggi. Pencapaian sasaran dengan menurun nya jumlah daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum serta indeks keamanan dan trantibum masyarakat diwilayah kecamatan merupakan hasil kerja keras atas petugas, khususnya dilapangan yang terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala. Beberapa Program yang mendukung sasaran adalah :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	2.510.851.500,00	2.490.988.600,00	99,21
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Umum	850.182.500,00	801.712.700,00	94,30
Program Penegakan Peraturan Daerah	389.313.000,00	363.473.950,00	93,36
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,62%

Kendati pencapaian telah sesuai target namun sebagai upaya peningkatan kinerja berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.78
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat” Tahun 2020

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kemanan dan ketertiban umum. • Adanya Linmas di tingkat kelurahan yang membantu SATPOL PP dalam menjaga Kemanan dan Ketertiban Umum. • Meningkatnya KOordinasi antara SATPOL PP-Kecamatan Kepolisian dan TNI dalam menjaga kondusifitas kemanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.	• Daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum, disebabkan maraknya anak jalanan yang nota bene bukan berasal dari Kota Cirebon • Dalam beberapa kasus (tidak berlaku umum) ditemukan adanya hubungan antara masalah kesejahteraan sosial dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum • Jumlah personil khususnya Aparatur Sipil Negara yang bertugas dilapangan masih belum ideal jika diukur dengan kondisi jumlah daerah yang harus dilakukan patrol secara berkala.	• Kerjasama antar daerah dalam memetakan strategi penanganan masalah atau isu ketentraman dan ketertiban umum. • Kerja sama lintas sektor, yaitu antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DInas Pendidikan, serta Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini masing-masing telah memiliki program yang sinergis dalam mengarah perbaikan kondisi social dan kualitas masyarakat yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. •

Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional

Tabel 3.79
Sasaran 4.1.2 "Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional"
Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
1.1.3	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional	Konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme (Kasus)	Kasus	0	0	0	0	0	100%

Sasaran "Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional" dengan indikator kinerja yaitu jumlah konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Ketentraman dan ketertiban serta kondisi yang kondusif ditandai salah satunya adalah dengan terciptanya kondisi masyarakat yang dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, yaitu tanpa adanya kasus terkait konflik kebangsaan dan nasionalisme.

Pencapaian Indikator "Konflik Kasus kebangsaan dan Nasionalisme"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan jumlah konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme pada target maksimal yaitu 0 / nol kejadian. Target ini terbilang cukup tinggi karena potensi terjadinya konflik di Kota Cirebon tidaklah rendah mengingat heterogen nya komposisi demografi masyarakat di Kota Ini. Namun patut disyukuri berdasarkan data yang disampaikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2020 tidak tercatat satupun kejadian terkait konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme, maka pencapaian atas indikator ini adalah 100%. Dengan predikat **Sangat Tinggi.**

Evaluasi Sasaran 4.1.2 "Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional"

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional berada dalam kategori atau predikat sangat tinggi dimana satu-satunya indikator sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan kedepan nya untuk tetap dipertahankan, kondisi demografi Kota Cirebon yang heterogen dan atmosfer konflik khususnya SARA maupun ideology di tingkat nasional yang sangat fluktuatif menjadi celah kemungkinan yang cukup tinggi terjadinya konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme. Program yang mendukung sasaran adalah sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	1.335.096.500,00	1.279.194.400,00	95,81%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	135.566.000,00	123.210.299,00	90,89%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			93,35%

Dalam rangka upaya mempertahankan kinerja kami melakukan analisa terhadap faktor pendukung kinerja serta permasalahan dan solusinya, berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.80
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 4.1.2. “Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Keadilan Sosial” Tahun 2020

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Masyarakat Kota Cirebon adalah masyarakay yang terbuka dan heterogen dan telah terjalin hubungan baik antar Suku atau ras di Kota Cirebon • Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak memberikan pelayanan yang diskriminatif		• Isu Nasional yang berpotensi mempengaruhi kondisi di daerah Kota Cirebon • Pemberitaan *Hoax* dari pihak –pihak yang tidak bertanggung-jawab	• Strategi “Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan” Dengan Arah Kebijakan “Meningkatkan ideologi wawasan kebangsaan” • Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

Tabel 3.81
Sasaran 4.1.3 "Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
1.1.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	Permil	70	75	65	75	95	86,7%
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana	Kelurahan	n/a	22	22	22	22	100%

Sasaran "Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana relevan dijadikan sasaran karena kejadian konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme merupakan bagian penting dalam kondusifitas suatu wilayah.

Pencapaian Indikator Ke 1 "Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Kelurahan yang memiliki forum Siaga Bencana"

Pada Tahun 2020 Jumlah Penyelamatan dan Kebakaran yang tertangani yaitu sebanyak 54 kasus dari jumlah total kebakaran 81 kasus di Kota Cirebon. Tertangani disini artinya kejadian penyelamatan atau kebakaran yang dilakukan sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) yaitu kurang dari 15 menit sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.

Hal ini jika dihitung jumlah penyelamatan kebakaran di Kota Cirebon dengan Penanganan sesuai Respons Time yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :

$$\frac{54 \text{ Kejadian}}{81 \text{ Kejadian}} \times 100\% = 67\%$$

Gambar 3.10
Rekap Penyelamatan per Kecamatan

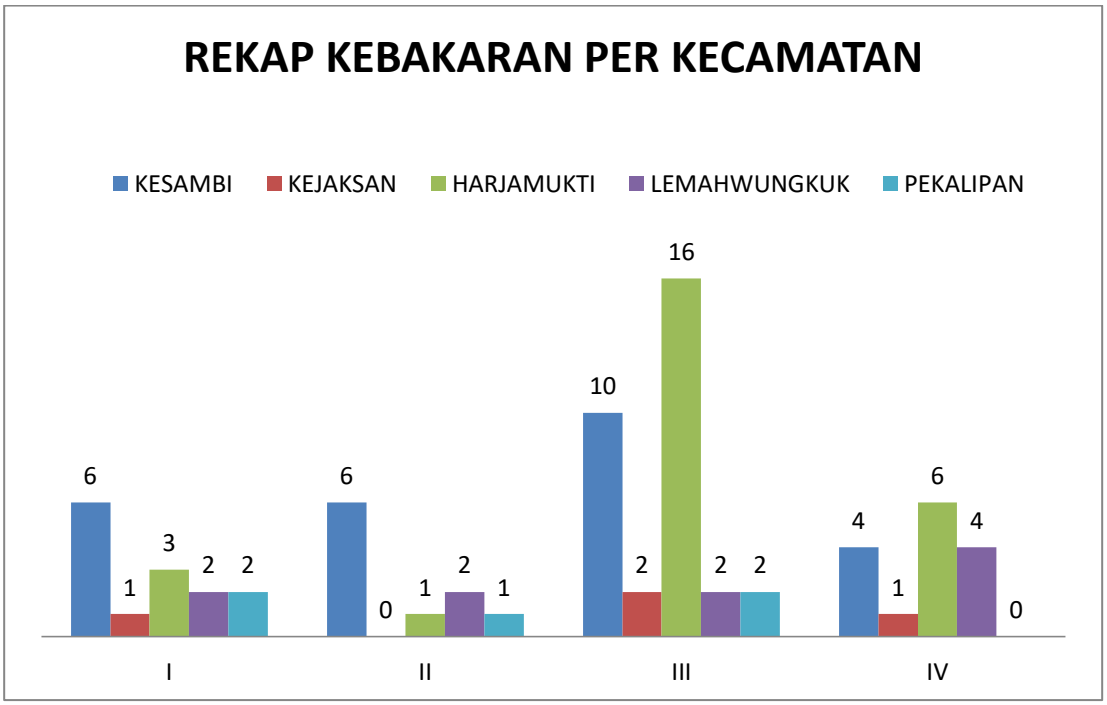

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, 2020

Data diatas menunjukan realisasi penangnan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) yaitu kurang dari 15 menit adalah 67% dari total seluruh kejadian pada tahun 2020, berdasarkan target pada tahun 2020 yaitu sebesar 75% maka pencapaian kinerja Indikator ini adalah 86,7% atau predikat pencapaian **Baik.**

Pencapaian Indikator ke-2 "Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana"

Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengupayakan penanganan bencana dengan melibatkan masyarakat sebagai penerapan prinsip G to S *(Government to Society)*, bekerjasama dengan masyarakat dinilai efektif untuk melakukan respon cepat terhadap kejadian bencana khsususnya banjir serta melakukan upaya mitigasi didalamnya, dilatarbelakangi hal tersebut ditargetkan ada 22 kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana. Upaya unit pengampu urusan penanggulangan bencana seyogyanya telah memonitoring seluruh forum kelurahan yang eksisting atau sudah terbentuk di Kota Cirebon sehingga berjumlah 22 Kelurahan. Dengan sudah terbentuknya forum di 22 kelurahan tersebut target tercapai 100% atau **Sangat Baik.**

Evaluasi Sasaran 4.1.3 "Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan sebanyak 22 Forum Siaga Bencana di setiap Kelurahan yang ada di Kota Cirebon. Data pada tahun 2019 telah ada Forum Siaga Bencana di setiap Kelurahan walaupun forum tersebut masih digabung dengan fungsi lain yaitu di bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) karena memang tugas dari forum tersebut salah satu fungsinya yaitu penanggulangan bencana.

Selama periode Januari 2020 hingga Desember 2020 terdapat 84 kejadian bencana yaitu:

1. Bencana banjir 8 kejadian
2. Pohon tumbang 40 kejadian
3. Rumah ambruk 12 kejadian
4. Banjir rob 3 kejadian
5. Pencarian orang tenggelam 2 kejadian
6. Jembatan ambruk 1 kejadian
7. Tanah longsor 5 kejadian

8. Kebakaran lahan 12 kejadian
9. Cuaca Ekstrim (angin puting beliung) 1 kejadian

Sementara itu untuk mempertahankan Forum Siaga Bencana yang telah ada di setiap Kelurahan, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi dengan cara melalui whats app grup serta melaksanakan pendampingan dengan menjadi instruktur ataupun narasumber dari setiap kegiatan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh Kelurahan. Dari kedua indikator diatas maka rata rata pencapaaian Sasaran 4.1.3 ini adalah 92%. Program yang mendudukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Progam Peningkatan Kesiapsiagan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5.066.789.000,00	5.062.909.250,00	100%
Progam Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	56.188.800,00	56.188.800,00	100%
Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	586.150.000,00	569.195.045,00	97%
Program Penyelamatan/ Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana'	84.140.000,00	69.103.200,00	82%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,83%

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.82
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah
Sasaran 4.1.3 "Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana" Tahun 2020

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Soliditas Tim Pemadam Kebakaran Pemda Kota Cirebon, dibuktikanya dengan prestasi dalam berbagai kompetisi • Tumbuhnya beberapa komunitas peduli lingkungan dan bencana yang menjadi salah satu alternative tanga bantuan dalam penanganan bencana	• Belum terpenuhinya tenaga fungsional pemadam kebakara sesuai dengan jumlah Analisa Beban Kerja • Di lingkup kebencanaan alam, Tenaga ASN dalam penanganan bencana masih belum memadai/kurang dari kebutuhan pada Analisa Beban Kerja • Forum Siaga Bencana masih belum sepenuhnya di isi oleh orang yang memilikikompetensi memadai tentang kebencanaan • Belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk Forum Siaga Bencana di setiap Kelurahan	• Merekrut Teanaga Fungsional Pemadam Kebakaran sesuai jumlah Analisa Beban Kerja yang telah disusun • Merekrut Teanaga Fungsional lingkup kebencanaan sesuai jumlah Analisa Beban Kerja yang telah disusun • Melakukan diklat baik bagi ASN serta bagi warga masyarakat, khususnya yang menjadi bagian dari Forum Siaga Bencana • Melakukan renovasi ataupun peningkatan sarana dan prasaran bagi Forum Siaga Bencana di tiap kelurahan, seperti menyediakan alat-alat kedaruratan bencana ex. Perahu Karet di daerah rawan banjir.

3.3 Akuntabilitas keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pembiayaan program kegiatan tersebut didukung dengan Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.83
Data Realisasi APBD Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 720.027.135.577,00	Rp. 702.694.100.756,00	98%
2	Belanja Langsung	Rp. 969.318.431.393,00	Rp. 880.179.433.916,00	91%
	Jumlah	Rp. 1.690.836.799.865,00	Rp. 1.633.913.808.482,00	97%

Komposisi anggaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki perbandingan Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung, Belanja Tidak Langsung sebesar 43% dari Total Aggaran dan Belanja Langsung sebesar 57%. Komposisi demikian cukup ideal karena Pembiayaan untuk program dan prioritas pembangunan lebih signifikan dibanding belanja tidak langsung yang didominasi belanja gaji/tunjangan pegawai.

Sebagai analisa terhadap komponen Belanja Langsung kami sajikan tabel berikut ini

Tabel 3.84
Data Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019		%
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	
1	Belanja Pegawai	Rp. 45.191.587.283,00	Rp. 44.555.923.695,00	99%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 627.152.644.893,00	Rp. 541.273.784.740,00	86%
3	Belanja Modal	Rp. 296.974.199.217,00	Rp. 294.349.725.481,00	99%
	Jumlah	Rp. 969.318.431.393,00	Rp. 880.179.433.916,00	91%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, di olah

Data diatas menunjukan realisasi anggaran Pemerintah daerah Kota Cirebon pada tahun 2020 cukup besar yaitu 91% dengan dominasi belanja barang dan jasa serta belanja modal , sementara belanja pegawai memiliki porsi paling rendah. Hal ini menunjukan bahwa komposisi pagu anggaran dalam APBD dalam kondisi yang cukup ideal karena belanja pegawai tidak lebih besar dari komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam rangka mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, kami analisa hal tersebut dengan menyandingkan data pecapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efesien jika capaian kinerja lebih besar disbanding realisasi anggaran , sebagai berikut :

Tabel 3.85
Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
Tahun 2020

NO	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Presentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi(%)
1.	MISI 1				
1.1	Misi 1 tujuan :Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	4	97%	-	-
1.1.1	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	2	96,83%	114,76%	-18%
1.1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1	98,46%	100,0%	-2%
1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	2	99,22%	92,17%	7%
1.1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	1	135,82%	92%	44%
1.1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	3	87,21%	99,69%	-12%
1.1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda	2	299%	99,07%	200%
1.1.7	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	2	101,08%	99,59%	1%
1.1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	2	97,76%	85%	13%

1.1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	1	83,61%	94%	-11%
1.1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	2	105,75%	99,44%	6%
11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	1	132,90%	1408%	-1275% (pencapaian sasaran kinerja telah lebih dari 100%/efektif)
12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	1	100%	10%	90%
13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	1	84,66%	98%	-13%
14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	3	153%	97%	56%
2.	MISI II				
2.1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	1	107,5%	-	-
2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	4	122%	91,27%	31%
2.1.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah	2	99,11%	81,66%	17%

2.1.3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	1	100%	98,70%	1,3%
2.1.4	Meningkatnya Maturitas SPIP	1	100%	97%	3%
2.1.5	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	103,31%	99%	4%
2.1.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	90%	93,69%	-3%
2.1.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	1	103,80%	99,8%	4%
2.1.8	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	3	100%	74%	26%
2.1.9	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City	2	100%	99,13%	1%
2.1.10	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2	96,33%	95,87%	0,46%
2.1.11	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	82,04%	99,6%	-18%
3.	MISI 3				
3.1	Tujuan : Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2	111,16%	-	-

3.1.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	1	100%	99%	1%
3.1.2	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.	1	94,08%	99,97%	-6%
3.1.3	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	1	100%	98%	2%
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1	123,60%	97,60%	26%
4.	MISI IV				
4.1	Tujuan : Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	1	109,4%	-	-
4.1.1	Meningkatkan kondusifitas Ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat	2	110%	95,62%	14,34%
4.1.2	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional	1	100%	93,35%	6,65%
4.1.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	2	92%	95,83%	-3,83%

Dari Tabel diatas terdapat beberapa kriteria dari sasaran pada masing-masing misi, disebut efesien jika capaian kinerja melebihi penyerapan anggaran, tidak efesien jika pencapaian kinerja di bawah realisasi anggaran program, berikut adalah kriteria tersebut :

1. Terdapat sasaran yang masuk pada kriteria paling efisien yaitu Sasaran 1.1.6 “Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda” dengan efesiensi hingga 200% dimana pencapaian kinerja sasaran hingga 299% sementara realisasi program anggaran 99,07%.
2. Terdapat sasaran yang masuk pada kriteria paling rendah dan tidak efisien yaitu sasaran yang tidak mencapai 100% atau lebih namun realisasi anggaranya lebih besar daripada capaianya, yaitu Sasaran 1.1.1 “Meningkatan akses dan mutu pendidikan” dengan pencapaian kinerja sasaran 96,83%, sementara realisasi program anggaran 114,76%, sehingga tidak efesien hingga -18%.